

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENERAPKAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**FARHAN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan yang memberikan rasa keadilan, khusus berkenaan dengan perkara narkotika dimana penyalah guna narkotika pantas dikenakan tindak pidana penjara atau tindakan rehabilitasi. Untuk mengetahui pengaturan atas penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang dimaksudkan dalam Pasal 127 seperti Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Di samping itu, untuk mengetahui layak tidaknya orang yang telah cukup umur atau dewasa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan teori penjatuhan putusan. Beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, dan teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, teori kebijaksanaan. Di samping itu, penelitian ini pun didasarkan pada teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normative. yang mencakup penelitian-penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum dan sejarah hukum narkotika di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dua putusan pengadilan yang telah dianalisis pada perkara penyalah guna yang terbukti sebagai pecandu narkotika dan pengedar narkotika adalah didasarkan pada keberadaan alat bukti dan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan KUHAP dalam menjatuhkan putusan hakim terkait dengan tindak pidana narkotika yaitu ditemukannya dua alat bukti yang dapat dijadikan sebagai Tersangka sebagai Pecandu Narkotika. Pada kedua putusan pengadilan yang dianalisis dalam tesis ini dengan menggunakan subsidair Pasal 127 Undang-Undang Narkotika diputuskan terdakwa tidak terbukti sebagai Pengedar Narkotika. Ketentuan Pasal 127 ayat (2) sebagai ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim pada kedua putusan pengadilan yang dianalisis dalam tesis ini tidak ditemukan kebebasan hakim dalam memberikan putusan perkara terkait dengan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika karena didasarkan pada alat bukti, barang bukti dan keterangan ahli terkait dengan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika. Ketentuan Pasal 127 ayat (3) bagi orang yang cukup umur (dewasa) yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila dapat dibuktikan hanya sebagai Pecandu Narkotika dengan kategori korban Narkotika maka putusan hakim dalam memutuskan untuk menjalani rehabilitasi dengan beracuan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana Pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) didasarkan pada keterangan ahli.

**JURIDICAL REVIEW OF CONSIDERATION IN INJURY  
APPLYING ARTICLE 127 LAW NUMBER  
35 of 2009 CONCERNING NARCOTICS**

**FARHAN**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to find out the basis for judges' consideration in making a decision that gives a sense of justice, specifically with regard to narcotics cases where narcotics abusers are liable to be subject to imprisonment or rehabilitation measures. To find out the arrangement of the application of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in relation to the articles intended in Article 127 such as Article 54, Article 55, and Article 103. In addition, to know whether or not a person is sufficient age or adult can be categorized as victims of narcotics abuse.*

*The theory used in this study is the basic theory of judges' consideration in imposing criminal and decision-making theories. Some theories or approaches used by judges in considering criminal charges in a case, namely the balance theory, the theory of art approaches and intuition, the theory of scientific approaches, and the theory of experience approaches, the theory of ratio decidendi, the theory of wisdom. In addition, this research is based on the theory of justice.*

*The research method used in this thesis is a normative juridical approach method. which includes studies based on applicable laws and regulations, legal principles and the history of narcotics law in Indonesia.*

*The results of this study conclude that consideration of judges applying Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics on two court decisions that have been analyzed in misuse cases that are proven as narcotics addicts and drug dealers is based on the existence of evidence and evidence possessed The defendant referred to the provisions of the KUHAP in dropping the judge's decision related to narcotics crimes, namely the discovery of two evidences that could be used as suspects as narcotics addicts. In the two court decisions analyzed in this thesis using subsidies Article 127 of the Narcotics Law it was decided that the defendant was not proven to be a Narcotics Distributor. no judge's freedom was found in giving case decisions related to the application of Article 127 of the Narcotics Law because it was based on evidence, evidence and information from experts related to the Defendant as a Narcotics addict. The provisions of Article 127 paragraph (3) for people of sufficient age (adults) who are proven to be victims of narcotics abuse if it can be proven only as Narcotics addicts in the category of Narcotics victims, the decision of the judge in deciding to undergo rehabilitation refers to the provisions of Article 54 of the Narcotics Act where mandatory addicts to undergo rehabilitation at the Drug Dependency Hospital (RSKO) are based on expert information.*